PENGUATAN BURSA KERJA KHUSUS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL





DATA LOWONGAN, PENCAKER & PENEMPATAN

PENCARI KERJA MENURUT USIA TAHUN 2023			
NO	LICIA	JU	MLAH
NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	17-19	774	862
2	20-29	756	974
3	30-44	175	188
4	45-54	19	31
5	55+	4	4
JUMLAH		1728	2059
	TOTAL	3787	

PENEMPATAN TENAGA KERJA MENURUT USIA TAHUN 2023

NO	USIA	JUMLAH	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	17-19	718	824
2	20-29	529	812
3	30-44	34	106
4	45-54	7	19
5	55+	3	3
JUMLAH		1291	1764
	TOTAL	3055	

PENCARI KERJA MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023

NIO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
NO		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	10	12	
2	SLTP	50	133	
3	SMU	260	447	
4	SMK	1252	1215	
5	D1	0	0	
6	D2	0	0	
7	D3	27	55	
8	S1	117	155	
9	S2	3	2	
10	DIV	9	40	
	JUMLAH	1728	2059	
	TOTAL	3787		

PENEMPATAN TENAGA KERJA MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
INU		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	1	6	
2	SLTP	19	96	
3	SMU	130	371	
4	SMK	1085	1198	
5	D1	0	0	
6	D2	0	0	
7	D3	7	10	
8	S1	49	83	
9	S2	0	0	
10	DIV	0	0	
	JUMLAH	1291	1764	
	TOTAL	3055		

DATA TENAGA KERJA DI BANTUL (MENURUT SEKTOR USAHA)

	PENEMPAIAN MENURUI SEKIUR 2022		
NO	SEKTOR	JUMLAH	
	SENIUR	L	Р
1	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	36	73
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	1068	1761
3	KONSTRUKSI	23	1
4	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	72	122
	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	13	42
5	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	14	52
6	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	13	7
7	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	26	17
8	JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	0	2
9	JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINYA	7	1
10	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	30	64
11	JASA PENDIDIKAN	21	61
12	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	2	53
13	KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI	0	12
14	KEGIATAN JASA LAINNYA		
15	JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA; KEGIATAN YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI	16	25







- TERDAFTAR 43 BKK
- 36 SMK NEGERI DAN SWASTA
- 4 BKK DI LPK SWASTA
- 3 BKK DI PERGURUAN TINGGI





PELUANG TENAGA KERJA BAGI INDUSTRI DI BANTUL

- 1956 total industry yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul
- 1. PERDAGANGAN BESAR/ECERAN 34,8 % (658 perusahaan)
- 2.INDUSTRI PENGOLAHAN = 17,7 % (336 perusahaan)
- 3. PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN LIMBAH, AKTIVITAS REMEDIASI = **8,3** % **(158)**

STRATEGI DISNAKERTRANS BANTUL

- Optimalkan peran dan fungsi BKK dengan komunikasi yang efektif dan terbuka perbanyak sharing session dalam forum informal
- Memberikan bimbingan penyuluhan kepada siswa di 20 Sekolah (50 siswa per sekolah) setiap tahun anggarannya bekerja sama dengan Disnakertrans Provinsi DIY.
- Keaktifan BKK dalam mencari informasi lowongan kerja, kliring informasi job antar BKK harus diflitrasi oleh Disnakertrans Bantul untuk data legalitas ataupun keamanan si Pemberi Kerja.
- Membantu komunikasi dalam bekerjasama dengan DUDI
- Perbanyak materi kewirausahaan bagi siswa pada saat penyuluhan bimbingan jabatan

- Pembentukan Forum Bursa Kerja Khusus dan melibatkan mereka dalam setiap forum komunikasi bidang ketenagakerjaan (Forum Sinergitas Ketenagakerjaan, Penyusunan Perda Ketenagakerjaan, Forum Vokasi Daerah, dan Forum lainnya)
- Pemberian insentif kepada admin pelaporan BKK
- Study Komparasi rutin untuk anggota aktif terdaftar BKK di Bantul
- Melibatkan Dikpora, Dikti untuk komunikasi dan Kerjasama efektif dalam penyelenggaraan BKK di Perguruan Tinggi dan SMK
- Edukasi dan Sosialisasi intensif kepada BKK terhadap penempatan Luar Negeri karena memiliki resiko yang tinggi terhadap para alumni

ISU UTAMA

1.PARENTING

2.PENDIDIKAN/PELATIHAN

3.PENYIAPAN TENAGA KERJA

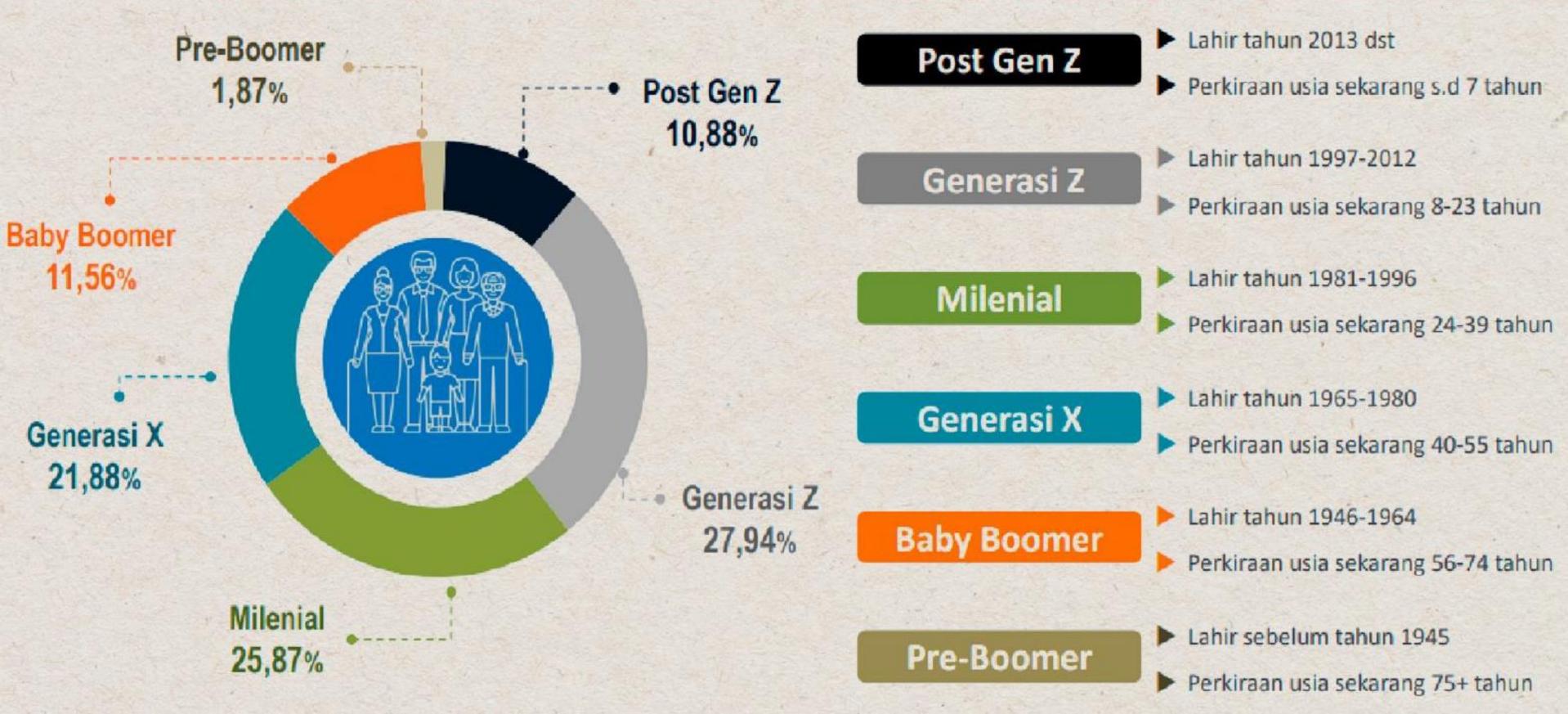
4.PEMBERI KERJA





STRUKTUR UMUR PENDUDUK INDONESIA

DIDOMINASI OLEH MILINEAL DAN GENERASI Z



UU 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PASAL 37)

PELAKSANA PENEMPATAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERTANGGUNGJAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

LEMBAGA SWASTA BERBADAN HUKUM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NO 39 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

PASAL 31

SELAIN PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWASTA BERBADAN HUKUM, PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAPAT DILAKUKAN DI BURSA KERJA KHUSUS



PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA PERMENAKER NO. PER. 39/MEN/XII/2016

PEMERINTAH

BURSA KERJA PEMERINT AH Public Employment Service (PES)
SIAPkerja (karirhub)
Kios SIAPkerja

BBPVP

SWASTA BERBADAN HUKUM

SWASTA

BERBADAN

USAHA

BURSA KERJA SWASTA

BURSA KERJA SWASTA LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia), Job DB, Job Street, Kompas Career, Career Builder . DNetwork. Kerjabilitas LPPRT (Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga) Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT

SATUAN PENDIDIKAN

BURSA KERJA KHUSUS Pendidikan Menengah (SLTA/SMK/MADRASAH ALIYAH) Pendidikan Tinggi (Universitas / Akademi), Lembaga Pelatihan Kerja

UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB VI: PENEMPATAN TENAGA

PASAL 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

PASAL 35 ayat (1) **TENTANG**

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga

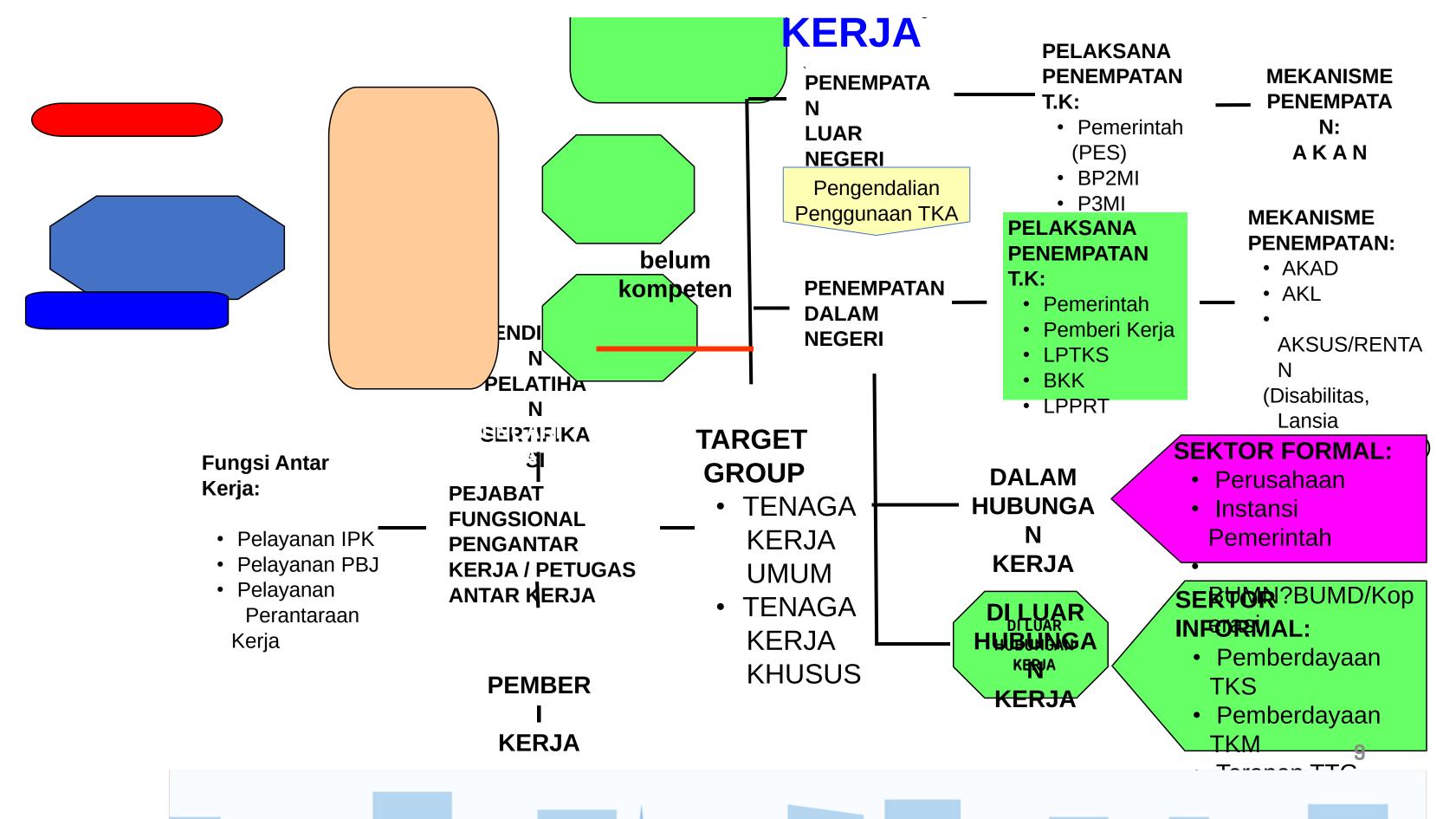
PASAL 37 ayat (2) TENTANG

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja oleh Instansi Pemerintah (di Pusat, di Provinsi, dan di Kab/Kota), BKK, dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) dilarang memungut biaya penempatan kepada tenaga kerja, baik langsung

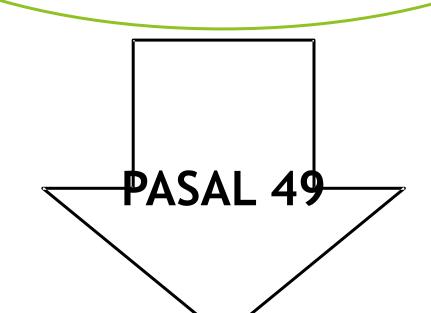
Peran SMK dalam mempersiapkan peserta didik

 Persiapan sumber daya manusia juga meliputi sejumlah proses penting seperti perencanaan, perhitungan, dan pengukuran total jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan Tekanannya adalah relevansi program pendidikan SMK dalam berbagai sektor pembangunan dilihat dari pemenuhan ketenagakerja terampil.
 Dalam pendekatan ketenagakerjaan ini kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja terampil dari segala tingkatan sekolah menengah

SISTEM DAN MEKANISME PENEMPATAN TENAGA



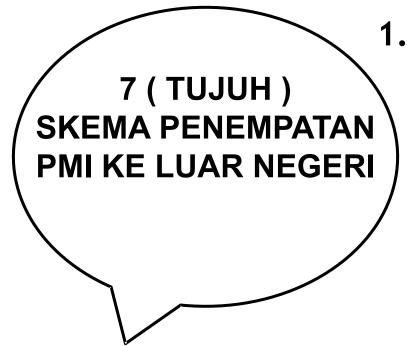
SIAPA YANG BOLEH MENEMPATKAN PMI BEKERJA KE LUAR NEGERI ?



BADAN
ADALAH LEMBAGA
PEMERINTAH NON
KEMENTERIAN SBG
PELAKSANA
KEBIJAKAN
(BNP2TKI/BPPMI)

PERUSAHAAN
PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
(P3MI) ADALAH BADAN
USAHA BERBENTUK PT
YG MENDAPAT IZIN DARI
MENAKER

PERUSAHAAN YANG MENEMPATKAN PMI UTK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI



1. PEMERINTAH (BADAN)

A. G TO G (GOVERMENT TO **GOVERMENT**)

KERJA SAMA PENEMPATAN PMI ANTAR PEMERINTAH DENGAN **PEMERINTAH**

B. G TO P (GOVERMENT TO

KERJASAMA PENEMPATAN PMI ANTAR PEMERINTAH DENGAN **PERUSAHAAN SWASTA**

C. SP2T (SPECIAL PLACEMENT PROGRAM TO TAIWAN)

KERJASAMA PENEMPATAN PMI ANTAR PEMERINTAH KHUSUS KE TAIWAN

2. BADAN USAHA SWASTA PTOP (PRIVATE TO PRIVATE)

KERJA SAMA PENEMPATAN PMI ANTAR PERUSAHAAN SWASTA DENGAN PERUSAHAAN SWASTA

3. ICT (INTERN **CORPORATE** TRANSFERSHIP)

BERDASARKAN KEBUTUHAN

PERUSAHAAN

4. MANDIRI

a.PMI PERSEORANGAN b.SSW (SPECIFIED SKILL WORKER)

KE JEPANG

Penempatan Antar Keria Antar

 Sebagai alternatif mengatasi sempitnya peluang kerja dalam negeri

UU NO.18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PMI

- Mengurangi pengangguran
- Alih teknologi



Berusia minimal 18 Tahun



Memiliki kompetensi



Sehat jasmani dan rohani



Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan



Jaminan Sosial Memiliki Dokumen lengkap yang dipersyaratkan

Meningkatkan kesejahteraan pmi dan keluarga Yang boleh Menempatkan Pekerja Migran Indonesia

- **BADAN** Adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Sbg Pelaksana Kebijakan (BP2MI)
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Adalah Badan Usaha Berbentuk PT Yg Mendapat Izin Dari Menaker
- Perusahaan Yang Menempatkan PMI Utk Kepentingan Perusahaan Sendiri (PUKS)

Pasal 69:

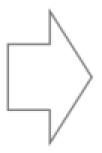
ORANG PERORANG DILARANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN PMI

Arah Revitalisasi Pendidikan Vokasi



SEKARANG

supply-driven sekolah sebagai penghela

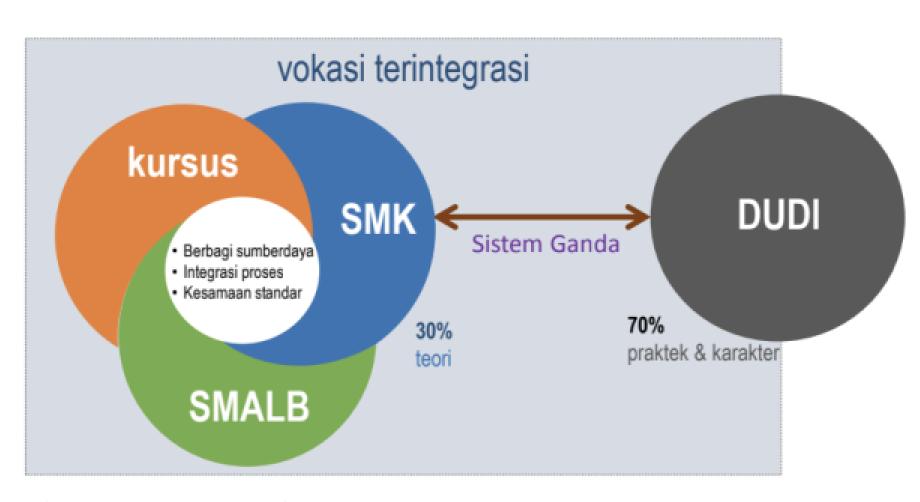


KE DEPAN

demand-driven industri sebagai penghela



- Pendidikan vokasi hanya merujuk pada SMK saja.
- Penyelenggaraan SMK, Kursus, dan SMA-LB berjalan sendiri-sendiri.
- Lemah link-and-match dengan pasar kerja (DUDI).



- Penyelenggaraan SMK, Kursus, dan SMA-LB secara terintegrasi.
- Kuat link-and-match dengan DUDI (kurikulum, praktek, pengujian, sertifikasi) → Sistem Ganda (siswa belajar: 30% teori di Sekolah – 670praktek & pendidikan karakter di DUDI).
- Keuntungan DUDI: mendapatkan tenaga kerja terbaik sesuai kebutuhan, lebih loyal, lebih efisien (tidak perlu training lagi).
- Keuntungan SISWA: mendapat kemahiran kerja mutakhir (occupational proficiency), pendidikan karakter (etos dan budaya kerja), sertifikat kompetensi.
- Keuntungan SEKOLAH: efisiensi sumberdaya (guru/instruktur, atat/bahan, bengkel praktek).

aks@kemendikhud

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja



LINGKUP KEGIATAN BKK



Mengetahui Regulasi (Peraturan)

- Terkait ketenagakerjaan
- Terkait Operasional



Memahami Manajemen pengembangan BKK

- Mengadministrasikan kegiatan secara tertib
- Melakukan klasifikasi lulusan SMK berdasarkan kebutuhan



Penyusunan program kerja

- Pendataan calon alumni SMK berbasis komputerisasi basis data
- Membuat evaluasi program kerja yang secara periodik



Membangun kemitraan dan keterampilan berkomunikasi

- Promosi BKK ke DU/DI
- Terkait Operasional
- Memelihara hubungan baik dengan DU/DI
- Membangun komunikasi yang harmonis dengan Kepala Sekolah/Guru/Karyawan, Disdik, Disnaker, pemerintah daerah dan lainlain
- Mengadakan keriasama/membangun komunikasi antar BKK melalui asosiasi/forum komunikasi BKK SMK



Proses monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan penempatan.

- Money per Kegiatan
- Money Berkala



Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri



Memungut biaya kepada calon pencari kerja/pencari kerja dengan cara apapun



Menempatkan tenaga kerja diluar alumninya

Permenaker 39 Tahun 2016 Pasal 32



HAL-HAL PENTING DALAM KEMITRAAN/KERJASAMA DENGAN INDUSTRI

- 1.KESAMAAN KEBUTUHAN (PEKERJAAN/LAPANGAN KERJA & TENAGA KERJA)
- 2.TUJUAN JELAS & TERUKUR (KOMPETENSI KERJA ANAK DIDIK)
- 3. SALING MENGUNTUNGKAN/BENEFIT
- 4. SALING MENGHORMATI & MEMPERCAYAI
- 5. HARUSA ADA KESEPAKATAN
- 6.KOMITMEN BERSAMA UNTUK MENCAPAI TUJUAN LEBIH BAIK, MENCIPTAKAN TENAGA KERJA BERKUALITAS

LANGKAH-LANGKAH MENJALIN KEMITRAAN/KERJASAMA DENGAN INDUSTRI

- 1.IDENTIFIKASI ATAU PEMETAAN KEBUTUHAN INDUSTRI YANG DITUJU
- 2.MENGGALI & MENGUMPULKAN INFORMASI
- 3.MENGANALISA INFORMASI
- 4.PENJAJAGAN KEMITRAAN (AUDENSI, PRESENTASI, KUNJUNGAN KE BLK/BKK)
- 5.PENYUSUNAN RENCANA KERJA (MENGAKOMODASI KEPENTINGAN & KEBUTUHAN INDUSTRI)
- 6.MEMBUAT KESEPAKATAN/MOU/KERJASAMA
- 7.PELAKSANAAN SESUAI KEBUTUHAN INDUSTRI
- 8.MONITORING & EVALUASI
- 9.PERBAIKAN & RENCANA TINDAK LANJUT

STRATEGISEKOLAH

- 1.MENJALIN KERJASAMA DENGAN DISNAKER KOTA/KAB 2.MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN APINDO KOTA/KAB
- 3.MELAKUKAN PENDEKATAN FORMAL & INFORMAL
- 4.MENGUNDANG INDUSTRI/PERUSAHAAN UNTUK KUNJUNGAN LOKASI BKK/BLK
- **5.PRESENTASI KOMPETENSI ANAK DIDIK**
- 6.MARKETING: TAMPILKAN KEUNGGULAN YANG DIMILIKI
- 7.KOMITMEN KUALITAS PRIBADI & KINERJA ANAK DIDIK

HAL PENTING: KOMPETENSI KERJA

- 1. STANDAR KUALITAS: LULUS (PLUS) SMK /D3/SARJANA
- 2. KEMAMPUAN BEKERJA: KINERJA
- 3. KEMAMPUAN KOMUNIKASI
- 4 . DISIPLIN
- 5. ETIKA & SOPAN SANTUN
- 6. KERJA SAMA / TEAM WORK
- 7. KREATIVITAS-INOVASI

Penyaluran dan Penempatan Tamatan

- Menindaklanjuti kerja sama dengan DUDIKA
- Melakukan penelusuran alumni dan dimasukkan ke dalam data base sekolah
- Membuat website khusus BKK yang selalu up to date
- Menanamkan jiwa enterpreunership kepada siswa melalui pelatihan ketrampilan untuk menjadi seorang wirausaha



